

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA  
NO.0233/PDT.G/2018/PA.TBH DI PENGADILAN  
AGAMA TEMBILAHAN KELAS II**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh**

**AZMIL FAUZI FARISKA  
11521101132**

**PROGRAM SI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1441 H/2019 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA  
NO.0233/PDT.G/2018/PA.TBH DI PENGADILAN  
AGAMA TEMBILAHAN KELAS II**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh**

**AZMIL FAUZI FARISKA  
11521101132**

**PROGRAM SI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1441 H/2019 M**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA NO.0233/PDT.G/2018/PA.TBH  
DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN*, yang ditulis oleh :

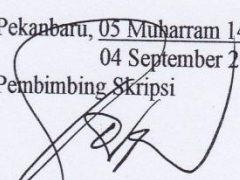
Nama : AZMIL FAUZI FARISKA

NIM : 11521101132

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Muharram 1441  
04 September 2019  
Pembimbing Skripsi

  
**Ade Fariz Fakhruddin, M.Ag**  
NIP. 1971112 200501 1 006



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA No.0233/Pdt.G/2018/Pa.Tbh DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN KELAS II*, yang ditulis oleh :

Nama : **AZMIL FAUZI FARISKA**  
NIM : 11521101132  
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at 25 Oktober 2019  
Waktu : 13.30 Wib  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 November 2019 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**


Ketua  
**Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag**

Sekretaris  
**Afrizal Ahmad, M.Sy**

Penguji I  
**Mardiana, MA**

Penguji II  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**

Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

## ABSTRAK

### zmi Fauzi Fariska (2019): **Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh putusan majelis hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang memutuskan perkara tentang harta bersama yang mana hakim memutuskan Penggugat (suami) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  sedangkan Tergugat (istri) mendapatkan  $\frac{3}{4}$  dari harta bersama. Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyebutkan bahwa: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Rumusan masalah yang diteliti adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan Harta Bersama dalam putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penetapan putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan. Penelitian ini berbentuk penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan perkara No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh, sebagai rujukan primernya, sedangkan bahan sekundernya dalam tulisan ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh serta buku, jurnal, karya ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka.

Hasil penelitian putusan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan dengan memutuskan Tergugat dalam hal ini sebagai istri mendapat ( $\frac{3}{4}$ ) lebih banyak dibandingkan Penggugat dalam hal ini sebagai suami yaitu ( $\frac{1}{4}$ ) sesuai dengan hakim dalam memutuskan perkara itu berdasarkan *Legal Certainty* (kepastian hukum) dan *Legal Justice* (keadilan hukum), kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, seperti perkara ini menurut legal certainty maka pembagian nya adalah isteri mendapat  $\frac{1}{2}$  dan suami pun mendapat  $\frac{1}{2}$  maka jika hanya ini yang diberlakukan secara kaku dalam perkara tersebut akan mereduksi nilai-nilai keadilan itu sendiri, dengan demikian hakim dalam menetapkan perkara harta bersama ini menggunakan *Legal Justice* (Keadilan Hukum). Dalam Islam konsep keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknyadengan kadar yang seimbang. Selama perkawinan Tergugat (istri) lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi sumber untuk membeli dan merenovasi rumah yang sekarang ini menjadi objek sengketa.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pertimbangan Putusan Hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II”. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana lengkap (strata-1) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah berkorban harta dan jiwa demi kejayaan Islam sehingga saat ini kita bisa merasakan hasil jerih payah Beliau.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pemikiran, dukungan, semangat dan do’a penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Kepada yang teristimewa untuk Ayahanda Drs.H.Abd.Gaffar.HK dan Ibunda Dra.Hj.Nurasiah yang dengan tulus dan ikhlas atas segala pengorbanan cinta, do’a dan telah memberikan dukungan, motivasi kepada ananda baik secara materil maupun spiritual. Jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga yaumul akhir dan semoga semua perjuanganmu akan dibalas oleh Allah SWT.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M. Ag selaku rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Hajar, M. Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau,
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, Mcl selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag selaku Wakil Dekan II dan Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah penulisan skripsi ini,
5. Kepada Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan,
6. Kepada Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag selaku pembimbing skripsi sekaligus selaku Pembimbing Akademis yang telah memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis,
7. Kepada Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy serta Seluruh Dosen-dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau,
8. Kepada seluruh pegawai Pengadilan Agama yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dan do'a sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan,
9. Kepada kakanda Yopi Setiawan S,Sy dan Hayana Arham SH serta Teman-teman seperjuangan terkhusus (Abdullah, Deni, Husnul Amaliah, Muhammad Zaki) dari awal kuliah sampai dengan saat ini yang selalu setia memberikan dukungan, semangat dan bantuan untuk memperlancar perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Serta berbagai pihak yang belum disebutkan di atas yang turut memberikan dukungan, berbagi pemikiran dan dorongan kepada penulis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan ide yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, penelitian dan karya ini tepat waktu.

Demikian skripsi ini penulis selesaikan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Maka dari itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini untuk masa yang akan datang.

Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan hanya kepada Allah SWT penulis memohon ampunan atas semua kesalahan. Semoga skripsi ini dapat berguna, aaammiinn...

Pekanbaru, November 2019  
Penulis,

**AZMIL FAUZI FARISKA**  
**NIM : 11521101132**

UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

### EMBAR PENGESAHAN

### NOTA PEMBIMBING

### PERSEMBAHAN

### ABSTRAK ..... i

### KATA PENGATAR ..... ii

### DAFTAR ISI ..... v

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	9

### BAB II PENGADILAN AGAMA DAN HAKIM

A. Kewenangan Pengadilan Agama.....	11
B. Kewenangan hakim.....	12
C. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara .....	13
D. Syarat-syarat menjadi hakim.....	19
E. Hakim Dalam Islam .....	21

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

A. Pengertian Harta Bersama.....	23
B. Dasar hukum harta bersama .....	26
C. Ruang lingkup harta bersama.....	29
D. Jenis harta bersama.....	33
E. Harta bersama menurut KHI .....	34

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**

**BAB V PENUTUP**

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
A. Putusan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama No:0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh.....	41
B. Pandangan hukum islam terhadap putusan nomor: 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh.....	48
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seseorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Untuk membentuk keluarga yang bahagia dibutuhkan rasa saling memahami antara suami isteri sehingga dapat tercipta keharmonisan, ketenangan dan kasih sayang karena ketiga poin tersebut merupakan kunci dari tujuan perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT, surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>2</sup>

Pernikahan juga merupakan rahmat dan nikmat dari Allah. Melalui pernikahan tersebut manusia bisa merasakan ketenangan, kasih sayang, dan kedamaian. Namun tidak setiap pasangan yang terikat dalam perkawinan

<sup>1</sup>. Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1985), Cet, Ke-3, h3.

<sup>2</sup>. Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Madinatu al-'Ulum 2012), hal. 406



tersebut dapat menyelesaikan misinya dengan sempurna, dalam perkawinan akan terjadi pergejolakan dalam rumah tangga yang berawal dari faktor-faktor tertentu. Pergejolakan tersebut akan membawa pernikahan kepada perceraian suami isteri yang tidak menemui jalan penyelesaian. Suami isteri sendiri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat mengambil keputusan bercerai walaupun perceraian tersebut dibolehkan.<sup>3</sup> Perceraian merupakan jalan terakhir karena dampak buruknya tidak sedikit dan sangat serius, sehingga dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibn Umar, Nabi SAW menyatakan :<sup>4</sup>

أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق. (رواه أبو داود و الحاكم)

Artinya : “Dari Ibn Umar bahwasanya nabi Muhammad SAW bersabda sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian. (HR. abu Dawud)”<sup>5</sup>

Setelah perceraian, tidak hanya kata-kata cerai dan kemudian pasangan tersebut bisa berpisah begitu saja. Akan ada lagi masalah-maslah yang akan mereka selesaikan selanjutnya, seperti permasalahan hak asuh anak, dan harta bersama.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan, baik kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya bernilai. Harta bersama berarti yang digunakan atau dimanfaatkan secara bersama-sama.”<sup>6</sup>

<sup>3</sup>. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 240

<sup>4</sup>. Slamet Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hal. 15

<sup>5</sup>. Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Dar Risalah Al-Alamiah, 2009). 3:505

<sup>6</sup> Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, Edisi Kedua, Cet-4 (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 342.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama diatur dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta bersama diakui secara hukum, termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta bersama juga diatur dalam hukum Islam. Meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri (dalam hukum Islam), ternyata setelah di analisis yang tidak boleh dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif bahwa kedua macam harta tersebut harus terpisah dari harta bersama tersebut.

Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 35 dan 36 disana telah dijelaskan tentang perbedaan harta dalam perkawinan. Harta tersebut adalah harta pribadi(bawaan) dan harta bersama. Harta pribadi berupa harta yang telah dimiliki suami istri sebelum perkawinan berlangsung dan tetap seutuhnya menjadi milik pribadi. Tidak ikut bercampur ke dalam harta bersama.

Pasal 35 ayat 1: “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, ayat 2: “harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.”<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Pustaka Yustisia, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: 2010), h. 291.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 36 ayat 1: “mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”, ayat 2: “mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.<sup>8</sup>

Adapun menurut KHI pasal 97 : ”Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>9</sup>

Sebagaimana di dalam surat gugatan Pengadilan Agama Tembilahan No:0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 maret 2018 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh dengan dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Pada awalnya Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari senin tanggal 17 maret 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:096/05/IV/2008 kemudian bercerai pada tanggal 20 Desember 2017 dengan putusan Pengadilan Agama tembilahan Nomor: 0794/Pdt.G/2017/PA.Tbh.
2. Selama perkawinan, dalam membina rumah tangga selama kurang lebih 9 tahun, penggugat dan tergugat telah memiliki harta bersama berupa antara lain yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1086 atas nama saudara Tergugat seluas 244 M<sup>2</sup> , diatasnya berdiri sebuah bangunan

<sup>8</sup> Ibid.,

<sup>9</sup> Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XIII  
Pasal 97



rumah tembok permanen seluas kurang lebih 151,62 M<sup>2</sup> yang ditaksir harganya kurang lebih Rp. 800.000.000.<sup>10</sup>

Sesuai dengan KHI Pasal 97: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Namun pada realitanya pada Putusan Nomor: 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh bahwa Hakim Pengadilan Agama Tembilahan memutuskan Penggugat (suami) mendapatkan  $\frac{1}{4}$  sedangkan Tergugat (isteri) mendapatkan  $\frac{3}{4}$  dari Harta Bersama.<sup>11</sup>

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti dan melihat lebih jauh permasalahan tersebut yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan berjudul **“Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh Di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II”**

## B. Batasan Masalah.

Agar penelitian ini terfokus dan terarah maka penulis membatasi masalahnya yaitu : Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh Di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II.

## C. Rumusan Masalah.

Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Harta Bersama dalam putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II

<sup>10</sup>. Salinan Putusan Nomor. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh, Hal.2

<sup>11</sup>. *Ibid*, Hal. 37

Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap penetapan putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya semua permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Harta Bersama dalam putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap penetapan putusan No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II

### 2. Kegunaan Penelitian.

- a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga(Ahwal Al-Syakhsiyyah) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Menjadikan bahan pertimbangan para penegak hukum dalam hal ini hakim, untuk lebih mengedepankan prinsip keadilan dalam memutuskan perkara selain mengedepankan pertimbangan hukum.
- c. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang Harta Bersama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Metode Penelitian.

Sebagai karya ilmiah maka tidak bisa lepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana secara sistematis.<sup>12</sup> Dengan demikian, metode merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal, dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus , yaitu studi tentang putusan No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berupa perundang-undangan dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang sangat relevan dengan materi yang dibahas, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.<sup>13</sup>

Sifat penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

### 2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka, yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.

<sup>12</sup>. Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* ,(Yogyakarta Kanisius, 1999), hal. 10

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi Data primer dan sekunder.

- a. Data primer: adalah data yang didapatkan dari berkas Salinan Putusan Perkara No:0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh.
- b. Data sekunder: adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian putusan No:0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh serta buku, jurnal, karya ilmiah yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

## 4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tetapi tetap perpegang pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan wawancara. Wawancara ini dimaksudkan agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas dari hakim yang menangani tentang masalah yang diteliti.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>. Ibid, hal.57

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Studi dokumen atau bahan pustaka

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan kepustakaan dari peraturan perundang-undangan dan literature yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Penulisan.

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b. Induktif, yaitu mengungkapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data tersebut diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum.

6. Teknik Analisis Data.

Data yang telah dikumpul dianalisa dengan menggunakan metode konten analisis.

**F. Sistematika Penulisan.**

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap kajian ini, maka penulis akan menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab kedua membahas tentang kewenangan Pengadilan Agama, kewenangan Hakim, pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara, Syarat-syarat menjadi Hakim.

Bab ketiga yaitu Tinjauan umum tentang Harta Bersama meliputi, Pengertian harta bersama, dasar hukum harta bersama, ruang lingkup harta bersama, jenis-jenis harta bersama, harta bersama menurut KHI.

Bab keempat yaitu membahas pertimbangan putusan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh. berisikan tentang pertimbangan hakim terhadap putusan perkara harta bersama di Pengadilan Agama Tembilahan, dan pandangan Hukum Islam terhadap putusan No. 0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh.

Bab kelima yaitu Penutup yang mana bab ini berisi Kesimpulan dan Saran.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### PENGADILAN AGAMA DAN HAKIM

#### A. Kewenangan Pengadilan Agama

Berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Kekuasaan Pengadilan Agama bahwasanya Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi Syariah; memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum Islam serta penentuan arah kiblat dan waktu sholat serta tugas dan kewenangan lai yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-undang.<sup>15</sup>

Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Agama diantaranya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Memberikan keterangan

Sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 52 ayat 1 Undang-undang tahun 1989.

#### 2. Hisab dan Rukyatul Hilal

#### 3. Menyelesaikan Kasus Sengketa

Tugas dan wewenang Pengadilan Agama yang cukup penting adalah menyelesaikan kasus sengketa secara Hukum Islam. Dalam hal ini sesuai yang tercantum dalam pasal 107 ayat 2 Undang-undang No.7 tahun 1989.

<sup>15</sup>. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Kekuasaan Pengadilan.

### Kewenangan Hakim.

Dalam wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan ke pengadilan pada Mahkamah Agung dan pengadilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan pada pengadilan khusus, hakim diwajibkan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Penjelasan dari pasal 5 ayat (1) tersebut menyatakan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dari penjelasan tersebut, dapatlah dimengerti tujuan dibuatnya ketentuan pasal 5 ayat (1) tersebut, dimana agar supaya putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditetapkanlah dasar kewenangan hakim dalam menjalankan tugasnya untuk mengadili, diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi kewajiban yang mutlak bagi hakim dalam mengadili perkara. Hal tersebut didasarkan atas setiap putusan hakim harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan dari setiap putusan hakim yang harus sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan maksud dari eksistensi hakim dan kekuasaan kehakiman, dimana dalam menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan diselenggarakanlah peradilan, dan dalam penyelenggaraan peradilan, hakim diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan, dan dalalam kewenanangnya untuk memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 Negara Republik Indonesia demi terciptanya negara hukum Indonesia. Itu berarti dalam kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim harus menafsirkan hukum secara kontekstual, yaitu melihat nilai-nilai hukum yang ada didalam ruang dan waktu dari masyarakat hukum yang diadilinya, dan dalam hal ini nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat hukum Indonesia dizaman postmodern.

Penafsiran hukum secara kontekstual ini bertujuan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dari suatu masyarakat hukum yang ada didalam ruang dan waktu yang merupakan tempat lahirnya hukum, sebagaimana ungkapan dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).<sup>16</sup>

#### C. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

<sup>16</sup>. Immanuel Christophel liwe, *kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana yang diajukan ke Pengadilan*, Lex Crimen Vol.III No.1, Hal.135-136



keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup>. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya

---

<sup>18</sup>. *Ibid*, Hal.142

perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.<sup>19</sup>

Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan : “Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Berdasarkan aturan hukum tersebut, terdapat norma hukum “mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk memenuhi norma tersebut, maka Hakim harus mengambil kebijaksanaan hukum”. Penentuan atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, secara teori para Hakim akan melihat “Konsep-konsep keadilan yang telah baku” Dalam konsep ini keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.

Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : adil (just), bersifat hukum (legal), sah menurut hukum (lawful), tak memihak (impartial), sama hak (equal), layak (fair), wajar secara moral (equitable), benar secara moral (righteous). Dari perincian tersebut ternyata bahwa pengertian konsep keadilan mempunyai makna ganda yang

<sup>19</sup>. Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta, Rineka Cipta, 1996), Hal.95



perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. Dalam setiap pengambilan kebijaksanaan oleh Hakim, maka Hakim selalu berlindung kepada Upaya Hukum yaitu Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, artinya apabila Hakim Tingkat Pertama mengambil kebijaksanaan dalam memutus perkara tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang harus dipatuhi, maka solusinya dipersilahkan naik banding untuk diuji kebijaksanaan tersebut, demikian pula kebijaksanaan hukum yang diambil oleh Hakim Tingkat banding apabila melanggar standard suatu norma hukum, pengujiannya melalui Kasasi Mahkamah Agung RI dan seterusnya sampai pengujian di Peninjauan Kembali, oleh karena itu diperlukan norma hukum sebagai standard bagi para Hakim dalam hal pengambilan suatu kebijaksanaan hukum untuk memutus perkara.<sup>20</sup>

Terdapat 6 (enam) prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia sebagaimana tercantum dalam *The Bangalore Principle*, yakni:

#### 1. Independensi

Independensi hakim merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan, dan prasyarat bagi terwujudnya cita-cita negara hukum.

#### 2. Ketidakberpihakan

Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang yang diajukan kepadanya.

<sup>20</sup>. Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hal. 12

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. **Integritas**

Integritas Hakim merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.

4. **Kepantasan dan kesopanan**

Kepantasan dan kesopanan merupakan norma kesusilaan pribadi dan norma kesusilaan antar pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim, baik sebagai pribadi maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas profesionalnya, yang menimbulkan rasa hormat, kewibawaan dan kepercayaan.

5. **Kesetaraan**

Kesetaraan merupakan prinsip yang menjamin perlakuan yang sama terhadap semua orang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab tanpa membedakan satu dengan yang lain atas dasar perbedaan agama, suku, ras, warna kulit, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik, status sosial ekonomi, umur, pandangan politik ataupun alasan-alasan yang serupa.

6. **Kecakapan dan keseksamaan**

Kecakapan dan keseksamaan Hakim merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan peradilan yang baik dan terpercaya. Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang

menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, ketekunan dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas professional Hakim.<sup>21</sup>

## 9. Syarat-syarat Menjadi Hakim.

Hakim merupakan unsur utama dalam Pengadilan, bahkan ia identik dengan Pengadilan itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan Hakim. Demikian halnya, keputusan Pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegak hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan Hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Diindonesia, idealisme hakim itu tercermin dalam symbol-simbol *Kartika*(taqwa), *cakra*(adil), *candra*(berwibawa), *sari*(berbudi luhur), dan *tirta*(jujur). Sifat-sifat yang abstrak itu dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang konkret, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Hal itu merupakan kriteria dalam melakukan penilaian terhadap perilaku hakim. Sikap dalam kedinasan itu mencakup:

1. Sikap Hakim dalam persidangan
2. Sikap Hakim terhadap sesame sejawat
3. Sikap Hakim terhadap bawahan atau pegawai
4. Sikap hakim terhadap atasan
5. Sikap pimpinan terhadap bawahan atau rekan Hakim
6. Sikap Hakim terhadap instansi lain

<sup>21</sup>. Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang:Setara Press, 2015) hal.141-142



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sifat-sifat yang abstrak itu ditransformasikan kedalam persyarakat Hakim sebagai diatur dalam peraturan Hakim perundang-undangan. Ia ditransformasikan kedalam UU Nomor 14 tahun 1986, UU Nomor 2 tahun 1986, UU Nomor 5 tahun 1986, UU Nomor 7 tahun 1989, UU Nomor 3 tahun 2006, UU Nomor 50 tahun 2009. Ia menjadi persyaratan seluruh hakim lingkungan peradilan syarat yang paling utama berbeda bagi hakim bagi hakim lingkungan Peradilan Agama disbanding dengan lingkungan lain, adalah “mutlak” harus beragama Islam, sedang pada lingkungan peradilan lain, Agama tidak dijadikan sebagai syarat.<sup>22</sup>

Sebagaimana didalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 13 dijelaskan bahwasanya untuk menjadi hakim ada beberapa syarat yaitu:

1. Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Warga negara Indonesia;
  - b. Beragama islam;
  - c. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - d. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
  - e. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G.30.S/PKI", atau organisasi terlarang yang lain;

<sup>22</sup>. Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hal. 106-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pegawai Negeri;

g. Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam;

h. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun;

i. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

2. Untuk dapat diangkat menjadi Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

### E. Hakim Dalam Islam

Adapun salah satu adab sebagai seorang hakim dalam islam adalah mampu bersikap adil. Al-Qur'an memperingatkan dalam berbagai ayat bahwa jiwa manusia cenderung mengikuti hawa nafsu. Kecintaan dan kebencian merupakan faktor yang memungkinkan manusia mendahulukan kebatilan daripada kebenaran, mendahulukan keadilan daripada keadilan.<sup>24</sup> Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآخِرِكُمْ ۚ وَلَا يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَعْدِلُوا كَقَدْرِ الظَّالِمِينَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٨﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan"<sup>25</sup>

<sup>23</sup>. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>24</sup>. Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas 1995), hal. 72

<sup>25</sup>. Kementrian Agama RI, *Op.Cit* . hal. 108



Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan, atau yang mempunyai hubungan dengan kekuasaan. Mereka adalah para pemimpin yang berpengaruh terhadap masyarakat.

Adapun konsep keadilan dalam islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknya dengan kadar yang seimbang. Konsep keadilan yang merupakan prinsip kedua setelah tauhid meliputi keadilan dalam berbagai hubungan: hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya, hubungan antara individu dengan hakim dan yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak yang terkait.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

#### A. Pengertian Harta Bersama.

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.<sup>26</sup>

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Harta dapat berarti barang-barang(uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.<sup>27</sup>

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Namun harta bersama tersebut akan menjadi harta yang tidak lagi dapat disebut sebagai harta bersama ketika telah terjadi cerai mati atau perceraian.<sup>28</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta, dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara

<sup>26</sup>. Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 200.

<sup>27</sup>. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *hukum perkawinan islam di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), h. 217

<sup>28</sup>. H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet.1, hlm. 179.

wajar dan memperoleh status social yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dari segi kegunaannya (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya (aspek hukum).

Secara ekonomi orang sudah biasa bergelut dengan harta yang dimilikinya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat suami isteri selama perkawinan.<sup>29</sup> Telah dikemukakan diatas bahwa harta bersama adalah harta hasil usaha bersama (suami-istri) didalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 mendefinisikan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan.<sup>30</sup>

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama. Dalam kitab-kitab fiqh tidak dikenal adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama nafaqah, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk syirkah. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.<sup>31</sup>

Hukum Islam Hanya mengenal syirkah. Harta bersama dalam perkawinan termasuk syirkah abdan mufawwadah, dikatakan syirkah afdan karena suami

<sup>29</sup>. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *loc.cit*, h. 217

<sup>30</sup>. Undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, (Jakarta: Armas Duta Jaya, 1990), h.

276.

<sup>31</sup>. Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016), h. 98.

istri secara bersama-sama bekerja membanting tulang dalam mencari nafkah sehari-hari. Dikatakan syirkah mufawwadah karena perkongsian antara suami istri itu tidak terbatas.<sup>32</sup>

Dari pengertian mengenai harta bersama sebagaimana diatas, jelaslah bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan setelah terjadinya suatu perkawinan yang akan membawa konsekuensi kedudukan harta benda, baik harta tetap maupun harta bergerak yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah menjadi hak bersama antara suami isteri tanpa membedakan ataupun mempersoalkan siapa yang bekerja, siapa yang memperoleh uang yang digunakan untuk membeli harta benda tersebut dan juga tanpa mempersoalkan harta benda tersebut diatasnamakan suami ataupun isteri.<sup>33</sup>

Mengenai pengertian harta bersama diatas terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, juga terdapat dalam pasal 35 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ayat (1) menyatakan:

*“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”*

sedang ayat (2) menyatakan:

*“ harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain “.*<sup>34</sup>

<sup>32</sup>. Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 154.

<sup>33</sup>. Ahmad Rafiq, Op.Cit, h.200

<sup>34</sup>. *Undang-undang No.1 tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001.*



## Dasar Hukum Harta Bersama.

Pada dasarnya, harta suami istri terpisah. Jadi masing-masing mempunyai hak milik untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Dalam hukum Islam tidak mengatur adanya harta gono gini dalam perkawinan, yang ada adalah menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita, sebagaimana dalam firman Allah, yaitu:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu." <sup>35</sup>

Dalam penjelasan tafsir Al-Maraghi dijelaskan Allah telah membebani kaum laki-laki dan wanita dengan berbagai pekerjaan. Kaum laki-laki mengerjakan perkara-perkara yang khusus untuk mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus pula dari pekerjaan itu tanpa disertai kaum wanita. Kaum wanita mengerjakan berbagai pekerjaan yang diperuntukkan bagi mereka, dan mereka memperoleh bagian khusus dari pekerjaan itu tanpa disertai oleh kaum pria. Masing-masing mereka tidak boleh iri terhadap apa yang telah dikhususkan bagi yang lainnya. <sup>36</sup>

<sup>35</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, , h. 84

<sup>36</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi 5*, (Semarang : Toha Putra 1993), 35

Ayat tersebut bersifat umum tidak ditujukan terhadap suami ataupun istri melainkan semua pria dan wanita. Jika mereka berusaha dalam kehidupannya sehari-hari, maka usaha mereka itu merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. Dalam konteks konvensional, suami adalah yang berkewajiban menanggung beban ekonomi, sedangkan istri adalah berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangga dalam pengertian yang lebih luas. Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama digolongkan ke dalam *syirkah al-abdan*, yaitu modal dari suami sedangkan istri andil jasa dan tenaganya. Adapun yang kedua, adalah dimana masing-masing mendatangkan modal, suami bekerja dan istri juga bekerja lalu dikelola bersama, hal ini disebut *syirkah al-inan*.<sup>37</sup>

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut:

- a. Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-

<sup>37</sup>. Ahmad Rofiq, Op.Cit, h. 201

ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.”

c. Kompilasi hukum islam pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.” Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebelum perkawinan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.<sup>38</sup>

Di dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.<sup>39</sup>

<sup>38</sup>. Slamet Abiding Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Yustisia, 1999), h.

<sup>39</sup>. Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15



## Ruang Lingkup Harta Bersama

Menurut Sayuti Thalib, terjadinya percampuran harta dapat dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri ataupun harta pencaharian. Dapat pula ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.<sup>40</sup>

Di samping dengan dua cara tersebut di atas, percampuran harta kekayaan suami istri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan suami istri itu. Dengan cara diam-diam memang telah terjadi percampuran harta kekayaan, apabila kenyataan suami istri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Akan tetapi, harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam keluarga.<sup>41</sup>

Menurut pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah,

<sup>40</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), h. 84

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 85

wasiat dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan dalam harta bersama.<sup>42</sup>

Kemudian untuk memperjelas status kepemilikan harta dalam perkawinan, termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi. Yahya Harahap telah mengemukakan tentang ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, yaitu:<sup>43</sup>

#### a. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

Lain halnya jika uang yang digunakan untuk membeli barang tersebut berasal dari harta pribadi suami atau istri, jika uang pembelian

<sup>42</sup> Undang-undang No 1 Tahun 1974, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG RI tahun 2001

<sup>43</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 275-278

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barang tersebut secara murni berasal dari harta pribadi, barang yang dibeli tidak termasuk obyek harta bersama. Harta yang seperti itu tetap menjadi milik pribadi suami atau istri.

#### Harta yang Dibeli dan Dibangun Sesudah Perceraian yang Dibiayai Dari Harta Bersama

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah.

Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

#### c. Harta yang Dapat Dibuktikan dan Diperoleh Selama Perkawinan

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta bersama atau tidak, ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi

#### d) Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.

Dengan demikian, fungsi harta pribadi dalam perkawinan, ikut menopang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sekalipun hak dan kepemilikan harta pribadi mutlak berada di bawah kekuasaan pemiliknya, namun harta pribadi tidak terlepas dari fungsinya dan dari kepentingan keluarga.

Barang pokoknya memang tidak diganggu gugat, tapi hasil yang tumbuh dari padanya jatuh menjadi obyek harta bersama. Ketentuan ini berlaku sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian

perkawinan. Jika dalam perjanjian perkawinan tidak diatur mengenai hasil yang timbul dari harta pribadi seluruh hasil yang diperoleh dari harta pribadi suami istri jatuh menjadi harta bersama. Misalnya rumah yang dibeli dari harta pribadi, bukan jatuh menjadi harta pribadi, tetapi jatuh menjadi harta bersama.

Oleh karena itu, harus dibedakan harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi dengan harta yang diperoleh dari hasil yang timbul dari harta pribadi. Dalam hal harta yang dibeli dari hasil penjualan harta pribadi, tetapi secara mutlak menjadi harta pribadi.

#### e) Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau istri, baik yang diperoleh dari keuntungan melalui perdagangan masing-masing ataupun hasil perolehan masing-masing pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau istri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

#### D. Jenis-jenis Harta Bersama.

Jika melihat asal-usul harta yang didapat dari suami-isteri, maka dapat disimpulkan bahwa harta tersebut dapat dibedakan dalam empat sumber yaitu:<sup>44</sup>

<sup>44</sup>. Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Op.cit*, h. 219

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh dari salah seorang suami atau isteri.
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah.
3. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan.
4. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah, khusus untuk salah seorang dari suami-isteri dan selain dari harta warisan.

#### E. Harta Bersama Menurut KHI

Adapun Harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam BAB XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan yaitu:<sup>45</sup>

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri.

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah

<sup>45</sup>. "Kompilasi Hukum Islam", Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

2. Suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa, hadiah, sodaqah atau lainnya.

**Pasal 88**

Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama.

**Pasal 91**

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

**Pasal 97**

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Adapun Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat pada BAB XII yaitu:<sup>46</sup>

<sup>46</sup>. Ibid, 2001

## Kewajiban suami

### Pasal 80

1 Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenal hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

2 Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

3 Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa

4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- c. Biaya pendidikan bagi anak

5 Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah tamkin sempurna dari isterinya

6 Isteri dapat membebaskan suaminya dan kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b

7 Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz

## Tempat Kediaman

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Pasal 81

1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### Kewajiban isteri

#### Pasal 83

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 84

Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.

Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan bukti yang sah.

Sedangkan Hak dan Kewajiban Suami Isteri di Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:<sup>47</sup>

#### Pasal 30

Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

#### Pasal 31

1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga

#### Pasal 32

1. Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama

<sup>47</sup>. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan



### Pasal 33

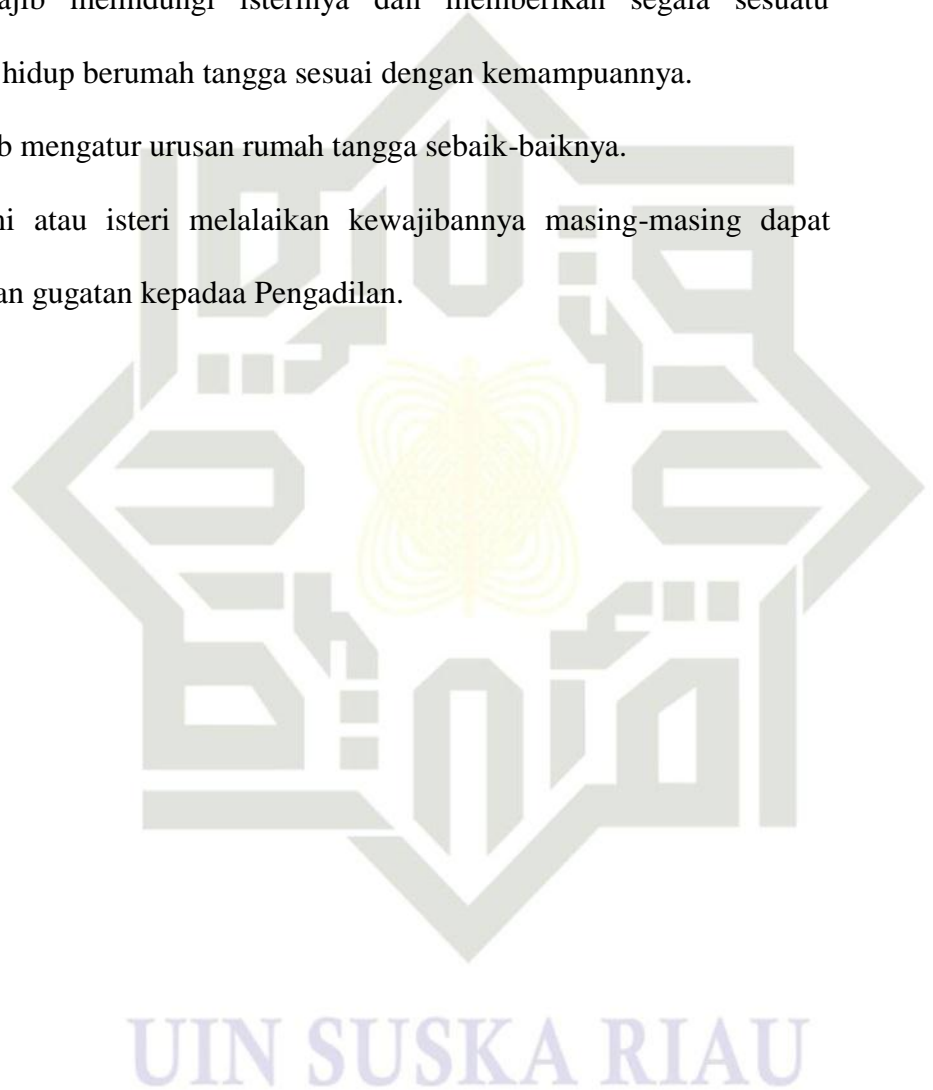
Suami isteri wajib saling-saling cinta mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

### Pasal 34

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Dari penjelasan diatas bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fakta persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa selama menjalani perkawinan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, Tergugat berperan lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi objek sengketa Harta Bersama dalam perkara *a quo*. Maka Hakim berpendapat menetapkan bagian masing-masing pihak terhadap Harta Benda objek sengketa yang menjadi Harta Bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah  $\frac{1}{4}$  (seperempat) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) bagian untuk tergugat.
2. Putusan hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh di Pengadilan Agama Tembilahan dengan memutuskan Tergugat dalam hal ini sebagai istri mendapat ( $\frac{3}{4}$ ) lebih banyak dibandingkan Penggugat dalam hal ini sebagai suami yaitu ( $\frac{1}{4}$ ) sesuai dengan hakim dalam memutuskan perkara itu berdasarkan *Legal Certainty* (kepastian hukum) dan *Legal Justice* (keadilan hukum), kepastian hukum adalah apa yang sudah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum islam, seperti perkara ini menurut legal certainty maka pembagian nya adalah isteri mendapat  $\frac{1}{2}$  dan suami pun mendapat  $\frac{1}{2}$  maka jika hanya ini yang diberlakukan secara



© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

kaku dalam perkara tersebut akan mereduksi nilai-nilai keadilan itu sendiri, dengan demikian hakim dalam menetapkan perkara harta bersama ini menggunakan *Legal Justice* (Keadilan Hukum). Dalam islam konsep keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, membebaskan sesuatu sesuai daya pikul seseorang, memberikan sesuatu yang memang menjadi haknyadengan kadar yang seimbang. Selama perkawinan Tergugat (istri) lebih dominan dalam mencari nafkah dan menghasilkan harta, yang kemudian harta tersebut menjadi sumber untuk membeli dan merenovasi rumah yang sekarang ini menjadi objek sengketa.

## B. Saran

Dari penjelasan hasil penelitian, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya ketika awal menikah hendaknya kedua belah pihak suami dan istri melakukan atau membuat yang namanya perjanjian nikah, sehingga hal-hal buruk yang terjadi dikemudian hari seperti hal nya pembagian harta bersama ini tidak menjadi masalah yang rumit
2. Saran untuk akademisi atau peneliti selanjutnya adalah semoga penelitian ini dapat membantu menambah refrensi dan diharapkan peneliti selanjutnya dapat membahas topik yang bervariasi.

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Abu Daud, 2009, *Sunan Abu Daud*, Beirut: Dar Risalah Al-Alamiah.
- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Mustafa Al-Maragi, 1993, *Terjemahan Tafsir al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra.
- Ahmad Rofiq, 2010, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad Sarwat, 2019, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Hamzah, 1996, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Anton Bekker dan Ahmad Charis Zubair, 1999, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius
- Direktorat Pembinaan Peradilan Islam, 2001, *Kompilasi Hukum Islam*
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jakarta: Depag RI.
- Fathur Rizqi, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, *Wawancara*.
- Hasbullah Bakry, 1985, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press
- Immanuel Christophel Liwe, *Kewenangan Hakim dalam Memeriksa dan Memutus Perkara Pidana Yang di Ajukan ke Pengadilan*, Lex Crimen, Vol.III No.I.
- Juhayni S. Praja, 1995, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas.
- Kementerian Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Bandung: CV Diponegoro.
- Mardani, 2016, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Muchlis Usman, 1999, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.  
 Yustisia, 2010, *Hukum Keluarga*, Jakarta: tp  
 Fatma, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, *Wawancara*.  
 Atjip, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.  
 Thalib, 1998, *Hukum Kekeluargaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo  
 Sirajuddin dan Winardi, 2015, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press  
 Slamet Abiding Aminuddin, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia  
 Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Satu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada  
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Kekuasaan Pengadilan.  
 Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: CV Mitra Utama.  
 Yahya Harahap, 2003, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika.  
 Yeni Kurniati, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, *Wawancara*.  
 Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul *PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA No.0233/Pdt.G/2018/Pa.Tbh DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN KELAS II*, yang dituliskan oleh :

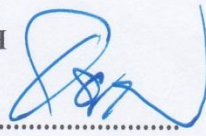
Nama : **AZMIL FAUZI FARISKA**  
NIM : 11521101132  
Program Studi : Hukum Keluarga (AH)  
Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Jum'at 25 Oktober 2019  
Waktu : 13.30 Wib  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Gedung Belajar Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

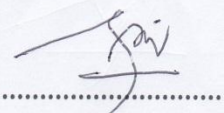
Pekanbaru, 05 November 2019 M

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

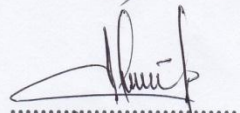
Ketua  
**Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag**



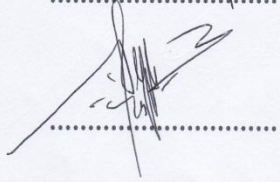
Sekretaris  
**Afrizal Ahmad, M.Sy**



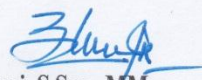
Penguji I  
**Mardiana, MA**

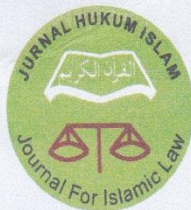


Penguji II  
**Dr. Sofia Hardani, M.Ag**



Mengetahui :  
Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Erni, S.Sos., MM**  
NIP. 19680226 199103 2 002



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : AZMIL FAUZI FARISKA

NIM : 11521101132

Jurusan : HUKUM KELUARGA

Judul : **PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA HARTA BERSAMA NO.0233/PDT.G/2018/PA.TBH DI  
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN KELAS II**

Pembimbing : Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 12 November 2019

An. Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 198804302019031010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor :  
Jumlah : 1 (satu) rangkap  
Perihal : **Nilai Skripsi**

Pekanbaru, 12/9 - 2019

Kepada  
Yth.Sdr. Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Dengan hormat,

Memenuhi maksud Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Nomor :Un.04/F.I.1/PP.01.1/463/2019, tanggal 05 September 2019 perihal yang sama pada pokok surat, dengan ini kami kirimkan sebagai berikut :

Nama : AZMIL FAUZI FARISKA  
NIM : 11521101132  
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYYAH)  
Nilai Skripsi : Nilai Angka : 90 Nilai Huruf : A

Demikianlah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam  
Dosen Pembimbing

ADE FARIZ FAHRULLAH, M.Ag

Peraturan Nilai :

Nilai A ; Bila Angka Antara 85-100  
Nilai A-; Bila Angka Antara 80 - 84  
Nilai B+; Bila Angka Antara 75-79  
Nilai B; Bila Angka Antara 70-74  
Nilai B-; Bila Angka Antara 65-69  
Nilai C+; Bila Angka Antara 60-64  
Nilai C ; Bila Angka Antara 55-59  
Nilai D ; Bila Angka Antara 50-54  
Nilai E; Bila Angka Antara 0-49



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Jl. HR. Soebrantas No. 77 Tembilahan

Website : <http://www.pa-tembilahan.go.id>

TEMBILAHAN

Nomor : W4-A4/070/PB.01/I/2019  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian/Riset

25 Januari 2019

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Di  
Tembilahan

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Menunjuk surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/2B tanggal 21 Januari 2019 Prihal Permohonan Izin Penelitian/Riset dalam rangka memenuhi kewajiban/tugas-tugas dalam melakukan/menyelesaikan studi jenjang strata satu (S1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Pekanbaru guna penyelesaian Skripsi dengan ini Pengadilan Agama telah memberi izin kepada :

Nama : AZMIL FAUZI FARISKA  
NIM : 11521101132  
Program Studi/Jenjang : Hukum/S1  
Alamat : Jl. Mandala Gg. Mandala  
Judul Penelitian : PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA NO.  
0233/Pdt.G/PA.Tbh DI PENGADILAN AGAMA  
TEMBILAHAN

Demikian surat izin penelitian ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya .



KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.  
NIP. 19690109.199703.1.002

Tembusan :  
1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Pekanbaru;  
2. Yang bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Jl. HR. Soebrantas No. 77 Telp/Fax (0768)325553

Website : <http://www.pa-tembilahan.go.id>

TEMBILAHAN

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W4-A4/610/PB.01/9/2019

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.  
NIP : 19690109.199703.1.002  
Pangkat/Golongan Ruang : Pembina TK.I/IV/b  
Jabatan : Ketua  
Unit Kerja : Pengadilan Agama Tembilahan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : AZMIL FAUZI FARISKA  
NIM : 115211011132  
Program Studi/Jenjang : Hukum Keluarga/S1  
Universitas : UIN Suska Pekanbaru  
Judul Penelitian : PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA HARTA BERSAMA NO. 0233/Pdt.G/PA.Tbh DI  
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

Benar telah selesai melaksanakan penelitian dan pengumpulan data terhitung mulai tanggal 21 Januari s/d 21 April 2019 di Pengadilan Agama Tembilahan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembilahan, 6 September 2019

Ketua,

KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H.  
NIP. 19690109.199703.1.002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Akasia No.01 Telephone ☎ (0768) 22904 Faximile (0768) 21383  
Tembilahan Kode Pos 29211

**REKOMENDASI PENELITIAN  
DAN PENGUMPULAN DATA (SURVEY)**

Nomor : 070/BKBP-POLMAS/2019/26

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/16943 Tanggal 3 Januari 2019, Tentang Pelaksanaan kegiatan **Riset** dan Pengumpulan Data Untuk Bahan **Skripsi**, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **AZMIL FAUZI FARISKA**  
NIM : 11521101132  
Program studi/Jenjang : Hukum Keluarga /S1  
Alamat : Jl. Mandala Gg. Mandala Tembilahan  
Judul Penelitian : **PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA NO. 0233/PDT.g/2018/pa.Tbh DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**  
Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN**

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang tidak ada hubungannya dengan penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 21 Januari s/d 21 April 2019.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Tembilahan, 21 Januari 2019

a.n KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kabid Politik dan Kemasyarakatan,



**HARYONO KARIM**

Pembina

NIP. 19750421 199403 1 003

**Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.





## PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/16943  
T E N T A N G



182010

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/64/2019 Tanggal 2 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : AZMIL FAUZI FARISKA   |
| 2. NIM / KTP         | : 11521101132   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA NO. 0233/pdt.G/2018/PA.Tbh DI PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN   |

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 3 Januari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU**

#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Indragiri Hilir  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Tembilahan
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

**Azmil Fauzi Fariska**, lahir di Benteng Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir 07 Agustus 1998 merupakan anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Drs.H.Abd.Gaffar.HK dan Ibunda Dra.Hj.Nurasiah Pada tahun 2002 penulis memulai pendidikan pada jenjang TK, kemudian pada tahun 2003 lanjut pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 009 Tembilahan, lulus pada tahun 2009. Setelah itu, penulis melanjutkan sekolah di MTs.N 2 Tembilahan selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Tamat Sekolah Menengah Pertama, penulis melanjutkan pendidikan pada tahun 2012 di MAS Darul Hikmah Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun. Kemudian pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan mengambil jurusan Hukum Keluarga.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul "***Pertimbangan Putusan Hakim Dalam Penyelesaian Perkarab Harta Bersama No.0233/Pdt.G/2018/PA.Tbh Di Pengadilan Agama Tembilahan Kelas II***" di bawah bimbingan Bapak Ade Fariz Fakhnullah, M.Ag Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 25 Oktober 2019, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.